



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/865/M.SM.02.00/2024 tanggal 29 Agustus 2024, Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024, Hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);

16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II
KELAS JABATAN
Pasal 2

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada Lampiran V, diberikan bagi Jabatan Fungsional yang telah tercantum di peta jabatan dan mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari instansi pembina.
- (2) Dalam hal Jabatan Fungsional belum tercantum di peta jabatan dan belum mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina maka kelas jabatan masih diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 Nomor 19) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

IMAN IRDIAN SARAGIH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

No.	Nama Jabatan Struktural	UNIT KERJA	Kelas Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	6
SEKRETARIAT DAERAH				
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	JPT
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	14	JPT
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	14	JPT
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	14	JPT
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	12	JA
6	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12	JA
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	12	JA
8	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	12	JA
9	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	12	JA
10	Kepala Sub Bagian Protokol	Sekretariat Daerah	9	JP
11	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	12	JA
12	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	12	JA
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	12	JA
14	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12	JA
SEKRETARIAT DPRD				
15	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	14	JPT
16	Kepala Bagian Umum	Sekretariat DPRD	12	JA
17	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	9	JP
18	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	12	JA
19	Kepala Bagian Keuangan	Sekretariat DPRD	12	JA
INSPEKTORAT				
20	Inspektur	Inspektorat	14	JPT
21	Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah I	Inspektorat	11	JA
22	Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah II	Inspektorat	11	JA
23	Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III	Inspektorat	11	JA
24	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat	12	JA
25	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan	Inspektorat	9	JP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
26	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	JPT
27	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	JA
28	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	JP
29	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	JA
30	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	JP
31	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	JP
32	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	JA
33	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	JP
34	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	JP
35	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	JA
36	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
37	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
38	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
39	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
40	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
41	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
42	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
43	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
44	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
45	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
46	Kepala UPTD Laboratorium Terpadu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	JP
47	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Terpadu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
48	Kepala UPTD Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	JP
49	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	JP
DINAS KESEHATAN				
50	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	14	JPT
51	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	JA
52	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan	9	JP
53	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kesehatan	9	JP
54	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	11	JA
55	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	11	JA
56	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	11	JA
57	Kepala UPTD Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	9	JP
58	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	8	JP
59	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Tanjung Marulak	Dinas Kesehatan	8	JP

60	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Pasar Gambir	Dinas Kesehatan	8	JP
61	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Sri Padang	Dinas Kesehatan	8	JP
62	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Satria	Dinas Kesehatan	8	JP
63	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Teluk Karang	Dinas Kesehatan	8	JP
64	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Rambung	Dinas Kesehatan	8	JP
65	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Pabatu	Dinas Kesehatan	8	JP
66	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Rantau Laban	Dinas Kesehatan	8	JP
67	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Berohol	Dinas Kesehatan	8	JP
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. KUMPULAN PANE				
68	Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Kumpulan Pane	Dinas Kesehatan	13	JPT
69	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Dinas Kesehatan	12	JA
70	Wakil Direktur Pelayanan	Dinas Kesehatan	12	JA
71	Kepala Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	11	JA
72	Kepala Bagian Keuangan	Dinas Kesehatan	11	JA
73	Kepala Bagian Program dan Rekam Medis	Dinas Kesehatan	11	JA
74	Kepala Bidang Pelayanan	Dinas Kesehatan	11	JA
75	Kepala Bidang Keperawatan	Dinas Kesehatan	11	JA
76	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	Dinas Kesehatan	11	JA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
77	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	JPT
78	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	JA
79	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	JP
80	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	JP
81	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	JA
82	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	JA
83	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	JA
84	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	JA
85	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	JP
86	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	JP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
87	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14	JPT
88	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan	12	JA

		Permukiman dan Pertanahan		
89	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9	JP
90	Kepala Bidang Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	JA
91	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	JA
92	Kepala UPTD Rusunawa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9	JP
93	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	JP
DINAS SOSIAL				
94	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	14	JPT
95	Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial	12	JA
96	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial	9	JP
97	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	11	JA
98	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	11	JA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
99	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	14	JPT
100	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	12	JA
101	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	9	JP
102	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	9	JP
103	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	11	JA
104	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	9	JP
105	Kepala Seksi Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	9	JP
106	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satuan Polisi Pamong Praja	11	JA
107	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan	Satuan Polisi Pamong Praja	9	JP
108	Kepala Seksi Kerjasama	Satuan Polisi Pamong Praja	9	JP
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN				
109	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	14	JPT
110	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	12	JA
111	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	9	JP
112	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	9	JP
113	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	11	JA

114	Kepala Bidang Industri	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	11	JA
115	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	9	JP
116	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	8	JP
DINAS PERHUBUNGAN				
117	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	14	JPT
118	Sekretaris Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12	JA
119	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan	9	JP
120	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perhubungan	9	JP
121	Kepala Bidang Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	11	JA
122	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan	Dinas Perhubungan	9	JP
123	Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	9	JP
124	Kepala Bidang Bina Angkutan	Dinas Perhubungan	11	JA
125	Kepala Seksi Angkutan Orang	Dinas Perhubungan	9	JP
126	Kepala Seksi Angkutan Barang	Dinas Perhubungan	9	JP
127	Kepala Bidang Bina Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	11	JA
128	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	9	JP
129	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan	9	JP
130	Kepala UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan	Dinas Perhubungan	9	JP
131	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan	Dinas Perhubungan	8	JP
132	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	9	JP
133	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	8	JP
134	Kepala UPTD Terminal	Dinas Perhubungan	9	JP
135	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal	Dinas Perhubungan	8	JP
136	Kepala UPTD Perparkiran	Dinas Perhubungan	9	JP
137	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran	Dinas Perhubungan	8	JP
DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
138	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14	JPT
139	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	12	JA
140	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9	JP
141	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11	JA

142	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11	JA
143	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11	JA
144	Kepala Bidang Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11	JA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
145	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	JPT
146	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	JA
147	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	JP
148	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	JP
149	Kepala Bidang Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	JA
150	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	JA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
151	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	JPT
152	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	JA
153	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	JP
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
154	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14	JPT
155	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12	JA
156	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	JP
157	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	JA
158	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	JA
159	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	JA
160	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	JA
161	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	JA
162	Kepala Bidang Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	JA

163	Kepala UPTD Balai Benih Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	JP
164	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	JP
165	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	JP
166	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	JP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
167	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	JPT
168	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	JA
169	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	JP
170	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	JP
171	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	JA
172	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	JA
173	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	JA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
174	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	14	JPT
175	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12	JA
176	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup	9	JP
177	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	9	JP
178	Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	11	JA
179	Kepala Bidang Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup	11	JA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
180	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	JPT
181	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12	JA

182	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	JP
183	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	JP
184	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	JA
185	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	JA
186	Kepala UPTD Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	JP
187	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	JP
188	Kepala UPTD Metrologi Legal	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	JP
189	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	JP
190	Kepala UPTD Perkuatan Permodalan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	JP
191	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perkuatan Permodalan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	JP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				
192	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	14	JPT
193	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12	JA
194	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9	JP
195	Kepala Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11	JA
196	Kepala Bidang Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11	JA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
197	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	JPT
198	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	JA
199	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	JP
200	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	JP
201	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	JA
202	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	JA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
203	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	14	JPT
204	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	12	JA
205	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	9	JP
206	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	11	JA
207	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	11	JA

		Pemberdayaan Masyarakat		
208	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	11	JA
209	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	9	JP
210	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	8	JP
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
211	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14	JPT
212	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	JA
213	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	JP
214	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	JP
215	Kepala Bidang Pencegahan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	JA
216	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	JP
217	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	JP
218	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	JA
219	Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	JP
220	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	JP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
221	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	JPT
222	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	JA
223	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	JP
224	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	JA

225	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	JA
226	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	JA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
227	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	JPT
228	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	JA
229	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	JP
230	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	JP
231	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	JA
232	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	JA
233	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	JA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
234	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	JPT
235	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	JA
236	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
237	Kepala Bidang Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	JA
238	Kepala Sub Bidang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
239	Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
240	Kepala Bidang Administrasi Belanja	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	JA
241	Kepala Sub Bidang Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
242	Kepala Bidang Administrasi Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	JA
243	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
244	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
245	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP

246	Kepala Bidang Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	JA
247	Kepala Sub Bidang Pembukuan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
248	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
249	Kepala Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	JA
250	Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendataan, dan Penilaian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
251	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	JP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
252	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	JPT
253	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	JA
254	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	JP
255	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	JP
256	Kepala Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	JA
257	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	JA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
258	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	JPT
259	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	JA
260	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	JP
261	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	JA
262	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	JA
263	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	JA
KECAMATAN BAJENIS				
264	Camat Bajenis	Kecamatan Bajenis	12	JA
265	Sekretaris Kecamatan Bajenis	Kecamatan Bajenis	11	JP
266	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bajenis	9	JP
267	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Bajenis	9	JP
268	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	9	JP
269	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bajenis	9	JP

270	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	9	JP
271	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	9	JP
Kelurahan Berohol				
272	Lurah Berohol	Kelurahan Berohol	9	JP
273	Sekretaris Kelurahan Berohol	Kelurahan Berohol	8	JP
274	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Berohol	8	JP
275	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Berohol	8	JP
276	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Berohol	8	JP
Kelurahan Bulian				
277	Lurah Bulian	Kelurahan Bulian	9	JP
278	Sekretaris Kelurahan Bulian	Kelurahan Bulian	8	JP
279	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Bulian	8	JP
280	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Bulian	8	JP
281	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Bulian	8	JP
Kelurahan Pinang Mancung				
282	Lurah Pinang Mancung	Kelurahan Pinang Mancung	9	JP
283	Sekretaris Kelurahan Pinang Mancung	Kelurahan Pinang Mancung	8	JP
284	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Pinang Mancung	8	JP
285	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Pinang Mancung	8	JP
286	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Pinang Mancung	8	JP
Kelurahan Teluk Karang				
287	Lurah Teluk Karang	Kelurahan Teluk Karang	9	JP
288	Sekretaris Kelurahan Teluk Karang	Kelurahan Teluk Karang	8	JP
289	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Teluk Karang	8	JP
290	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Teluk Karang	8	JP
291	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Teluk Karang	8	JP
Kelurahan Bandar Sakti				
292	Lurah Bandar Sakti	Kelurahan Bandar Sakti	9	JP
293	Sekretaris Kelurahan Bandar Sakti	Kelurahan Bandar Sakti	8	JP
294	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Bandar Sakti	8	JP
295	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Bandar Sakti	8	JP
296	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Bandar Sakti	8	JP
Kelurahan Durian				
297	Lurah Durian	Kelurahan Durian	9	JP
298	Sekretaris Kelurahan Durian	Kelurahan Durian	8	JP
299	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Durian	8	JP
300	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Durian	8	JP
301	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Durian	8	JP
Kelurahan Pelita				
302	Lurah Pelita	Kelurahan Pelita	9	JP
303	Sekretaris Kelurahan Pelita	Kelurahan Pelita	8	JP

304	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Pelita	8	JP
305	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Pelita	8	JP
306	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Pelita	8	JP
KECAMATAN PADANG HILIR				
307	Camat Padang Hilir	Kecamatan Padang Hilir	12	JA
308	Sekretaris Kecamatan Padang Hilir	Kecamatan Padang Hilir	11	JP
309	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Padang Hilir	9	JP
310	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Padang Hilir	9	JP
311	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	9	JP
312	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Padang Hilir	9	JP
313	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	9	JP
314	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	9	JP
Kelurahan Tambangan				
315	Lurah Tambangan	Kelurahan Tambangan	9	JP
316	Sekretaris Kelurahan Tambangan	Kelurahan Tambangan	8	JP
317	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Tambangan	8	JP
318	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Tambangan	8	JP
319	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tambangan	8	JP
Kelurahan Tebing Tinggi				
320	Lurah Tebing Tinggi	Kelurahan Tebing Tinggi	9	JP
321	Sekretaris Kelurahan Tebing Tinggi	Kelurahan Tebing Tinggi	8	JP
322	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Tebing Tinggi	8	JP
323	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Tebing Tinggi	8	JP
324	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tebing Tinggi	8	JP
Kelurahan Bagelen				
325	Lurah Bagelen	Kelurahan Bagelen	9	JP
326	Sekretaris Kelurahan Bagelen	Kelurahan Bagelen	8	JP
327	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Bagelen	8	JP
328	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Bagelen	8	JP
329	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Bagelen	8	JP
Kelurahan Damar Sari				
330	Lurah Damar Sari	Kelurahan Damar Sari	9	JP
331	Sekretaris Kelurahan Damar Sari	Kelurahan Damar Sari	8	JP
332	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Damar Sari	8	JP
333	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Damar Sari	8	JP
334	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Damar Sari	8	JP
Kelurahan Deblod Sundoro				

335	Lurah Deblod Sundoro	Kelurahan Sundoro	Deblod	9	JP
336	Sekretaris Kelurahan Deblod Sundoro	Kelurahan Sundoro	Deblod	8	JP
337	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Sundoro	Deblod	8	JP
338	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Sundoro	Deblod	8	JP
339	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Sundoro	Deblod	8	JP
Kelurahan Satria					
340	Lurah Satria	Kelurahan Satria		9	JP
341	Sekretaris Kelurahan Satria	Kelurahan Satria		8	JP
342	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Satria		8	JP
343	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Satria		8	JP
344	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Satria		8	JP
Kelurahan Tambangan Hulu					
345	Lurah Tambangan Hulu	Kelurahan Tambangan Hulu		9	JP
346	Sekretaris Kelurahan Tambangan Hulu	Kelurahan Tambangan Hulu		8	JP
347	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Tambangan Hulu		8	JP
348	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Tambangan Hulu		8	JP
349	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tambangan Hulu		8	JP
KECAMATAN PADANG HULU					
350	Camat Padang Hulu	Kecamatan Hulu	Padang	12	JA
351	Sekretaris Kecamatan Padang Hulu	Kecamatan Hulu	Padang	11	JP
352	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Hulu	Padang	9	JP
353	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Hulu	Padang	9	JP
354	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Hulu	Padang	9	JP
355	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Hulu	Padang	9	JP
356	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Hulu	Padang	9	JP
357	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Hulu	Padang	9	JP
Kelurahan Lubuk Baru					
358	Lurah Lubuk Baru	Kelurahan Baru	Lubuk	9	JP
359	Sekretaris Kelurahan Lubuk Baru	Kelurahan Baru	Lubuk	8	JP
360	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Baru	Lubuk	8	JP
361	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Baru	Lubuk	8	JP
362	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Baru	Lubuk	8	JP
Kelurahan Pabatu					
363	Lurah Pabatu	Kelurahan Pabatu		9	JP
364	Sekretaris Kelurahan Pabatu	Kelurahan Pabatu		8	JP
365	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Pabatu		8	JP
366	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Pabatu		8	JP
367	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Pabatu		8	JP

Kelurahan Lubuk Raya					
368	Lurah Lubuk Raya	Kelurahan Raya	Lubuk	9	JP
369	Sekretaris Kelurahan Lubuk Raya	Kelurahan Raya	Lubuk	8	JP
370	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Raya	Lubuk	8	JP
371	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Raya	Lubuk	8	JP
372	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Raya	Lubuk	8	JP
Kelurahan Padang Merbau					
373	Lurah Padang Merbau	Kelurahan Merbau	Padang	9	JP
374	Sekretaris Kelurahan Padang Merbau	Kelurahan Merbau	Padang	8	JP
375	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Merbau	Padang	8	JP
376	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Merbau	Padang	8	JP
377	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Merbau	Padang	8	JP
Kelurahan Persiakan					
378	Lurah Persiakan	Kelurahan Persiakan		9	JP
379	Sekretaris Kelurahan Persiakan	Kelurahan Persiakan		8	JP
380	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Persiakan		8	JP
381	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Persiakan		8	JP
382	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Persiakan		8	JP
Kelurahan Tualang					
383	Lurah Tualang	Kelurahan Tualang		9	JP
384	Sekretaris Kelurahan Tualang	Kelurahan Tualang		8	JP
385	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Tualang		8	JP
386	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Tualang		8	JP
387	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tualang		8	JP
Kelurahan Bandar Sono					
388	Lurah Bandar Sono	Kelurahan Sono	Bandar	9	JP
389	Sekretaris Kelurahan Bandar Sono	Kelurahan Sono	Bandar	8	JP
390	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Sono	Bandar	8	JP
391	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Sono	Bandar	8	JP
392	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Sono	Bandar	8	JP
KECAMATAN RAMBUTAN					
393	Camat Rambutan	Kecamatan Rambutan		12	JA
394	Sekretaris Kecamatan Rambutan	Kecamatan Rambutan		11	JP
395	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Rambutan		9	JP
396	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Rambutan		9	JP
397	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan		9	JP
398	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Rambutan		9	JP

399	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	9	JP
400	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	9	JP
Kelurahan Karya Jaya				
401	Lurah Karya Jaya	Kelurahan Karya Jaya	9	JP
402	Sekretaris Kelurahan Karya Jaya	Kelurahan Karya Jaya	8	JP
403	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Karya Jaya	8	JP
404	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Karya Jaya	8	JP
405	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Karya Jaya	8	JP
Kelurahan Lalang				
406	Lurah Lalang	Kelurahan Lalang	9	JP
407	Sekretaris Kelurahan Lalang	Kelurahan Lalang	8	JP
408	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Lalang	8	JP
409	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Lalang	8	JP
410	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Lalang	8	JP
Kelurahan Rantau Laban				
411	Lurah Rantau Laban	Kelurahan Rantau Laban	9	JP
412	Sekretaris Kelurahan Rantau Laban	Kelurahan Rantau Laban	8	JP
413	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Rantau Laban	8	JP
414	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Rantau Laban	8	JP
415	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Rantau Laban	8	JP
Kelurahan Mekar Sentosa				
416	Lurah Mekar Sentosa	Kelurahan Mekar Sentosa	9	JP
417	Sekretaris Kelurahan Mekar Sentosa	Kelurahan Mekar Sentosa	8	JP
418	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Mekar Sentosa	8	JP
419	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Mekar Sentosa	8	JP
420	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Mekar Sentosa	8	JP
Kelurahan Sri Padang				
421	Lurah Sri Padang	Kelurahan Sri Padang	9	JP
422	Sekretaris Kelurahan Sri Padang	Kelurahan Sri Padang	8	JP
423	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Sri Padang	8	JP
424	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Sri Padang	8	JP
425	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Sri Padang	8	JP
Kelurahan Tanjung Marulak				
426	Lurah Tanjung Marulak	Kelurahan Tanjung Marulak	9	JP
427	Sekretaris Kelurahan Tanjung Marulak	Kelurahan Tanjung Marulak	8	JP
428	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Tanjung Marulak	8	JP
429	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Tanjung Marulak	8	JP

430	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tanjung Marulak	8	JP
Kelurahan Tanjung Marulak Hilir				
431	Lurah Tanjung Marulak Hilir	Kelurahan Tanjung Marulak Hilir	9	JP
432	Sekretaris Kelurahan Tanjung Marulak Hilir	Kelurahan Tanjung Marulak Hilir	8	JP
433	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Tanjung Marulak Hilir	8	JP
434	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Tanjung Marulak Hilir	8	JP
435	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tanjung Marulak Hilir	8	JP
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA				
436	Camat Tebing Tinggi Kota	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	12	JA
437	Sekretaris Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	11	JP
438	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	JP
439	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	JP
440	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	JP
441	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	JP
442	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	JP
443	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	JP
Kelurahan Bandar Utama				
444	Lurah Bandar Utama	Kelurahan Bandar Utama	9	JP
445	Sekretaris Kelurahan Bandar Utama	Kelurahan Bandar Utama	8	JP
446	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Bandar Utama	8	JP
447	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Bandar Utama	8	JP
448	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Bandar Utama	8	JP
Kelurahan Badak Bejuang				
449	Lurah Badak Bejuang	Kelurahan Badak Bejuang	9	JP
450	Sekretaris Kelurahan Badak Bejuang	Kelurahan Badak Bejuang	8	JP
451	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Badak Bejuang	8	JP
452	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Badak Bejuang	8	JP
453	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Badak Bejuang	8	JP
Kelurahan Mandailing				
454	Lurah Mandailing	Kelurahan Mandailing	9	JP
455	Sekretaris Kelurahan Mandailing	Kelurahan Mandailing	8	JP
456	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Mandailing	8	JP
457	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Mandailing	8	JP
458	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Mandailing	8	JP
Kelurahan Pasar Baru				

459	Lurah Pasar Baru	Kelurahan Baru	Pasar	9	JP
460	Sekretaris Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan Baru	Pasar	8	JP
461	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Baru	Pasar	8	JP
462	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Baru	Pasar	8	JP
463	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Baru	Pasar	8	JP
Kelurahan Pasar Gambir					
464	Lurah Pasar Gambir	Kelurahan Gambir	Pasar	9	JP
465	Sekretaris Kelurahan Pasar Gambir	Kelurahan Gambir	Pasar	8	JP
466	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Gambir	Pasar	8	JP
467	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Gambir	Pasar	8	JP
468	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Gambir	Pasar	8	JP
Kelurahan Tebing Tinggi Lama					
469	Lurah Tebing Tinggi Lama	Kelurahan Tebing Tinggi Lama	Tebing	9	JP
470	Sekretaris Kelurahan Tebing Tinggi Lama	Kelurahan Tebing Tinggi Lama	Tebing	8	JP
471	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Tebing Tinggi Lama	Tebing	8	JP
472	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Tebing Tinggi Lama	Tebing	8	JP
473	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tebing Tinggi Lama	Tebing	8	JP
Kelurahan Rambung					
474	Lurah Rambung	Kelurahan Rambung		9	JP
475	Sekretaris Kelurahan Rambung	Kelurahan Rambung		8	JP
476	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Rambung		8	JP
477	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Rambung		8	JP
478	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Rambung		8	JP

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

IMAN IRDIAN SARAGIH

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DAFTAR NAMA JABATAN PEKAKSANA DAN JABATAN LAINNYA DAN
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	6
1	Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	13	JPT
2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	JPT
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	13	JPT
4	Penata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	7	Jabatan Pelaksana
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah	7	Jabatan Pelaksana
6	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat Daerah	5	Jabatan Pelaksana
7	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah	7	Jabatan Pelaksana
8	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat Daerah	6	Jabatan Pelaksana
9	Dokumentalis Hukum	Sekretariat Daerah	6	Jabatan Pelaksana
10	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretariat Daerah	7	Jabatan Pelaksana
11	Pengelola Layanan Operasional	Sekretariat Daerah	6	Jabatan Pelaksana
12	Pengelola Keprotokolan	Sekretariat Daerah	6	Jabatan Pelaksana
13	Penata Keprotokolan	Sekretariat Daerah	7	Jabatan Pelaksana
14	Pengelola Layanan Pengadaan	Sekretariat Daerah	6	Jabatan Pelaksana
15	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat	5	Jabatan Pelaksana
16	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat	7	Jabatan Pelaksana
17	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat	6	Jabatan Pelaksana
18	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	5	Jabatan Pelaksana
19	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat DPRD	7	Jabatan Pelaksana
20	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat DPRD	6	Jabatan Pelaksana
21	Penata Keprotokolan	Sekretariat DPRD	7	Jabatan Pelaksana
22	Dokumentalis Hukum	Sekretariat DPRD	6	Jabatan Pelaksana
23	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	7	Jabatan Pelaksana

24	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Jabatan Pelaksana
25	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	Jabatan Pelaksana
26	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	Jabatan Pelaksana
27	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Jabatan Pelaksana
28	Kurator	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Jabatan Pelaksana
29	Operator Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	Jabatan Pelaksana
30	Operator Layanan Operasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	Jabatan Pelaksana
31	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	5	Jabatan Pelaksana
32	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	6	Jabatan Pelaksana
33	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Kesehatan	6	Jabatan Pelaksana
34	Pengelola Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	6	Jabatan Pelaksana
35	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	7	Jabatan Pelaksana
36	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Kesehatan	7	Jabatan Pelaksana
37	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	7	Jabatan Pelaksana
38	Penata Layanan Operasional	Dinas Kesehatan	7	Jabatan Pelaksana
39	Pengelola Layanan Kesehatan	UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	6	Jabatan Pelaksana
40	Pengadministrasi perkantoran	UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	5	Jabatan Pelaksana
41	Penelaah Teknis Kebijakan	UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	7	Jabatan Pelaksana
42	Pengelola Layanan Operasional	UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	6	Jabatan Pelaksana
43	Pengolah Data dan Informasi	UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	6	Jabatan Pelaksana
44	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	Jabatan Pelaksana
45	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	Jabatan Pelaksana
46	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	Jabatan Pelaksana
47	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	Jabatan Pelaksana
48	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	Jabatan Pelaksana
49	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	Jabatan Pelaksana
50	Operator Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	Jabatan Pelaksana
51	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	Jabatan Pelaksana
52	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	Jabatan Pelaksana
53	Teknisi Laboratorium	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	Jabatan Pelaksana
54	Penata Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	Jabatan Pelaksana
55	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	Jabatan Pelaksana

56	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7	Jabatan Pelaksana
57	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7	Jabatan Pelaksana
58	Penata Layanan Operasional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7	Jabatan Pelaksana
59	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	Jabatan Pelaksana
60	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	Jabatan Pelaksana
61	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Jabatan Pelaksana
62	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	7	Jabatan Pelaksana
63	Pengelola Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	6	Jabatan Pelaksana
64	Operator Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Jabatan Pelaksana
65	Pengolah Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	6	Jabatan Pelaksana
66	Penata Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	7	Jabatan Pelaksana
67	Pengelola Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja	6	Jabatan Pelaksana
68	Pranata Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Jabatan Pelaksana
69	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Sosial	5	Jabatan Pelaksana
70	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Sosial	6	Jabatan Pelaksana
71	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	7	Jabatan Pelaksana
72	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	5	Jabatan Pelaksana
73	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	6	Jabatan Pelaksana
74	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	7	Jabatan Pelaksana
75	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	6	Jabatan Pelaksana
76	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan	7	Jabatan Pelaksana
77	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan	6	Jabatan Pelaksana
78	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan	5	Jabatan Pelaksana
79	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan	7	Jabatan Pelaksana
80	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan	7	Jabatan Pelaksana

81	Konselor SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan	7	Jabatan Pelaksana
82	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan	7	Jabatan Pelaksana
83	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	Jabatan Pelaksana
84	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	Jabatan Pelaksana
85	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7	Jabatan Pelaksana
86	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	Jabatan Pelaksana
87	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7	Jabatan Pelaksana
88	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	Jabatan Pelaksana
89	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	Jabatan Pelaksana
90	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Lingkungan Hidup	7	Jabatan Pelaksana
91	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Lingkungan Hidup	7	Jabatan Pelaksana
92	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup	5	Jabatan Pelaksana
93	Operator Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	5	Jabatan Pelaksana
94	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Jabatan Pelaksana
95	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	Jabatan Pelaksana
96	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Jabatan Pelaksana
97	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Jabatan Pelaksana
98	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	Jabatan Pelaksana
99	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	Jabatan Pelaksana
100	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	Jabatan Pelaksana
101	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	Jabatan Pelaksana
102	Pengelola Layanan Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	Jabatan Pelaksana
103	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perhubungan	7	Jabatan Pelaksana
104	Pengolah data dan Informasi	Dinas Perhubungan	6	Jabatan Pelaksana
105	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	5	Jabatan Pelaksana
106	Pengelola Keprotokolan	Dinas Perhubungan	6	Jabatan Pelaksana
107	Pengawas Transportasi Darat	Dinas Perhubungan	7	Jabatan Pelaksana
108	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Perhubungan	6	Jabatan Pelaksana
109	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Perhubungan	7	Jabatan Pelaksana

110	Operator Layanan Operasional	Dinas Perhubungan	5	Jabatan Pelaksana
111	Petugas Transportasi Darat	Dinas Perhubungan	6	Jabatan Pelaksana
112	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Jabatan Pelaksana
113	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Jabatan Pelaksana
114	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Jabatan Pelaksana
115	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Jabatan Pelaksana
116	Pengelola Siaran	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Jabatan Pelaksana
117	Penata Layanan Operasional	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Jabatan Pelaksana
118	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	Jabatan Pelaksana
119	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Jabatan Pelaksana
120	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Jabatan Pelaksana
121	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Jabatan Pelaksana
122	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Jabatan Pelaksana
123	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Jabatan Pelaksana
124	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	5	Jabatan Pelaksana
125	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7	Jabatan Pelaksana
126	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6	Jabatan Pelaksana
127	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah	6	Jabatan Pelaksana
128	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah	5	Jabatan Pelaksana
129	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah	7	Jabatan Pelaksana
130	Fasilitator Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah	7	Jabatan Pelaksana
131	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha dan Menengah	6	Jabatan Pelaksana
132	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5	Jabatan Pelaksana
133	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7	Jabatan Pelaksana
134	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6	Jabatan Pelaksana
135	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6	Jabatan Pelaksana
136	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7	Jabatan Pelaksana

137	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	Jabatan Pelaksana
138	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6	Jabatan Pelaksana
139	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6	Jabatan Pelaksana
140	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7	Jabatan Pelaksana
141	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7	Jabatan Pelaksana
142	Operator Layanan Operasional	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	Jabatan Pelaksana
143	Pengelola Layanan Kesehatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6	Jabatan Pelaksana
144	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Jabatan Pelaksana
145	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Jabatan Pelaksana
146	Pengolah Data dan Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Jabatan Pelaksana
147	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Jabatan Pelaksana
148	Operator Layanan Operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Jabatan Pelaksana
149	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5	Jabatan Pelaksana
150	Pengolah Data dan Informasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6	Jabatan Pelaksana
151	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7	Jabatan Pelaksana
152	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7	Jabatan Pelaksana
153	Pengelola Layanan Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6	Jabatan Pelaksana
154	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	Jabatan Pelaksana
155	Pengolah Data dan Informasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Jabatan Pelaksana
156	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Jabatan Pelaksana
157	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Jabatan Pelaksana
158	Pengelola Layanan Operasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Jabatan Pelaksana
159	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	Jabatan Pelaksana
160	Pengolah Data dan Informasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Jabatan Pelaksana
161	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	Jabatan Pelaksana

162	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	Jabatan Pelaksana
163	Pengolah Data dan Informasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Jabatan Pelaksana
164	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Jabatan Pelaksana
165	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Jabatan Pelaksana
166	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Jabatan Pelaksana
167	Penata Layanan Operasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Jabatan Pelaksana
168	Konselor SDM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Jabatan Pelaksana
169	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Rambutan	5	Jabatan Pelaksana
170	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Rambutan	6	Jabatan Pelaksana
171	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Rambutan	7	Jabatan Pelaksana
172	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Rambutan	6	Jabatan Pelaksana
173	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	7	Jabatan Pelaksana
174	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Bajenis	5	Jabatan Pelaksana
175	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Bajenis	6	Jabatan Pelaksana
176	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Bajenis	7	Jabatan Pelaksana
177	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Bajenis	6	Jabatan Pelaksana
178	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	7	Jabatan Pelaksana
179	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Padang Hilir	5	Jabatan Pelaksana
180	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Padang Hilir	6	Jabatan Pelaksana
181	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Padang Hilir	7	Jabatan Pelaksana
182	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Padang Hilir	6	Jabatan Pelaksana
183	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	7	Jabatan Pelaksana
184	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	5	Jabatan Pelaksana
185	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	6	Jabatan Pelaksana
186	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	7	Jabatan Pelaksana
187	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	6	Jabatan Pelaksana
188	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	7	Jabatan Pelaksana
189	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Padang Hulu	5	Jabatan Pelaksana
190	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Padang Hulu	6	Jabatan Pelaksana
191	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Padang Hulu	7	Jabatan Pelaksana
192	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Padang Hulu	6	Jabatan Pelaksana

193	Penata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	7	Jabatan Pelaksana
194	Pengelola Umum Operasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup.	1	Jabatan Pelaksana

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

IMAN IRDIAN SARAGIH



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

No	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup & Dampak Program (Level 1~5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3)	Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3)	Faktor 4 Hubungan Personal		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8)	Faktor 6 Kondisi Lain (Level 1~6)							
								Sifat Hub. (Level 1~4)	Tujuan Hub. (Level 1~4)									
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
SEKRETARIAT DAERAH																		
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	3555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
6	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
8	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
9	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
10	Kepala Sub Bagian Protokol	Sekretariat Daerah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
11	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575

12	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
14	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
SEKRETARIAT DPRD																		
15	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
16	Kepala Bagian Umum	Sekretariat DPRD	12	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
17	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
18	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	12	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
19	Kepala Bagian Keuangan	Sekretariat DPRD	12	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
INSPEKTORAT																		
20	Inspektur	Inspektorat	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
21	Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah I	Inspektorat	11	1990	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	1	310
22	Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah II	Inspektorat	11	1990	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	1	310
23	Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III	Inspektorat	11	1990	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	1	310
24	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat	12	2140	1	175	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
25	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan	Inspektorat	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
26	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
27	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
28	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
29	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
30	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
31	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

32	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
33	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
34	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
35	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
36	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
37	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
38	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
39	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
40	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
41	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
42	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
43	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
44	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
45	Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP Negeri 10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
46	Kepala UPTD Laboratorium Terpadu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
47	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Terpadu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
48	Kepala UPTD Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
49	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
DINAS KESEHATAN																		
50	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975

51	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
52	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
53	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kesehatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
54	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
55	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
56	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
57	Kepala UPTD Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
58	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
59	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Tanjung Marulak	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
60	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Pasar Gambir	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
61	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Sri Padang	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
62	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Satria	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
63	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Teluk Karang	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
64	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Rambung	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
65	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Pabatu	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
66	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Rantau Laban	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
67	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Berohol	Dinas Kesehatan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. KUMPULAN PANE																		
68	Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Kumpulan Pane	Dinas Kesehatan	13	2715	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	975
69	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Dinas Kesehatan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
70	Wakil Direktur Pelayanan	Dinas Kesehatan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
71	Kepala Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
72	Kepala Bagian Keuangan	Dinas Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575

73	Kepala Bagian Program dan Rekam Medis	Dinas Kesehatan	11	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
74	Kepala Bidang Pelayanan	Dinas Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
75	Kepala Bidang Keperawatan	Dinas Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
76	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	Dinas Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
77	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
78	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
79	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
80	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
81	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
82	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
83	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
84	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
85	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
86	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
87	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
88	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
89	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

90	Kepala Bidang Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
91	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
92	Kepala UPTD Rusunawa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
93	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
DINAS SOSIAL																		
94	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
95	Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
96	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
97	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
98	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
99	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
100	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
101	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
102	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
103	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
104	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
105	Kepala Seksi Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
106	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satuan Polisi Pamong Praja	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575

107	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan	Satuan Polisi Pamong Praja	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
108	Kepala Seksi Kerjasama	Satuan Polisi Pamong Praja	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN																		
109	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
110	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
111	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
112	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
113	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
114	Kepala Bidang Industri	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
115	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
116	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
DINAS PERHUBUNGAN																		
117	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
118	Sekretaris Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
119	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
120	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
121	Kepala Bidang Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
122	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
123	Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
124	Kepala Bidang Bina Angkutan	Dinas Perhubungan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
125	Kepala Seksi Angkutan Orang		9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
126	Kepala Seksi Angkutan Barang	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

127	Kepala Bidang Bina Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
128	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
129	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
130	Kepala UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
131	Kepala sub bagian tata usaha UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan	Dinas Perhubungan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
132	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
133	Kepala sub bagian tata usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
134	Kepala UPTD Terminal	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
135	Kepala sub bagian tata usaha UPTD Terminal	Dinas Perhubungan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
136	Kepala UPTD Perparkiran	Dinas Perhubungan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
137	Kepala sub bagian tata usaha UPTD Perparkiran	Dinas Perhubungan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA																		
138	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
139	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
140	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
141	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
142	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
143	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
144	Kepala Bidang Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
145	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
146	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

147	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
148	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
149	Kepala Bidang Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
150	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
151	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
152	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
153	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																		
154	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
155	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
156	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
157	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
158	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
159	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
160	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
161	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
162	Kepala Bidang Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
163	Kepala UPTD Balai Benih Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

164	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
165	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
166	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
167	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
168	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
169	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
170	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
171	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
172	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
173	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
174	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
175	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
176	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
177	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
178	Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
179	Kepala Bidang Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
180	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975

181	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
182	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
183	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
184	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
185	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
186	Kepala UPTD Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
187	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
188	Kepala UPTD Metrologi Legal	Dinas Perdagangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
189	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
190	Kepala UPTD Perkuatan Permodalan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
191	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perkuatan Permodalan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																		
192	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
193	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
194	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

195	Kepala Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
196	Kepala Bidang Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
197	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
198	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
199	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
200	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
201	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
202	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
203	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
204	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
205	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
206	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575

207	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan	Dinas Perempuan, Anak dan Masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Pemberdayaan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
208	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Dinas Perempuan, Anak dan Masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Pemberdayaan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
209	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Perempuan, Anak dan Masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Pemberdayaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
210	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Perempuan, Anak dan Masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Pemberdayaan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

211	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
212	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
213	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
214	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
215	Kepala Bidang Pencegahan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
216	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
217	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
218	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
219	Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
220	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

221	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975	
222	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575	
223	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310	
224	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575	
225	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575	
226	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																			
227	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975	
228	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	2140	1	175	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575	
229	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310	
230	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310	
231	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575	
232	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575	
233	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH																			
234	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975	
235	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	2140	1	175	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575	
236	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310	

237	Kepala Bidang Pendapatan	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
238	Kepala Sub Bidang Pajak Daerah	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
239	Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
240	Kepala Bidang Administrasi Belanja	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
241	Kepala Sub Bidang Anggaran	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
242	Kepala Bidang Administrasi Aset Daerah	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
243	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
244	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
245	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
246	Kepala Bidang Akuntansi	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
247	Kepala Sub Bidang Pembukuan	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
248	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
249	Kepala Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575

250	Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendataan, dan Penilaian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
251	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
252	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
253	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
254	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
255	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
256	Kepala Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
257	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
258	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
259	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
260	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
261	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
262	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
263	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575

KECAMATAN BAJENIS																		
264	Camat Bajenis	Kecamatan Bajenis	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
265	Sekretaris Kecamatan Bajenis	Kecamatan Bajenis	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
266	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bajenis	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
267	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Bajenis	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
268	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
269	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bajenis	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
270	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
271	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
Kelurahan Berohol																		
272	Lurah Berohol	Kecamatan Bajenis	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
273	Sekretaris Kelurahan Berohol	Kecamatan Bajenis	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
274	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
275	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
276	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Bulian																		
277	Lurah Bulian	Kecamatan Bajenis	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
278	Sekretaris Kelurahan Bulian	Kecamatan Bajenis	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
279	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
280	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
281	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Pinang Mancung																		
282	Lurah Pinang Mancung	Kecamatan Bajenis	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
283	Sekretaris Kelurahan Pinang Mancung	Kecamatan Bajenis	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
284	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
285	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

286	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Teluk Karang																		
287	Lurah Teluk Karang	Kecamatan Bajenis	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
288	Sekretaris Kelurahan Teluk Karang	Kecamatan Bajenis	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
289	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
290	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
291	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Bandar Sakti																		
292	Lurah Bandar Sakti	Kecamatan Bajenis	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
293	Sekretaris Kelurahan Bandar Sakti	Kecamatan Bajenis	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
294	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
295	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
296	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Durian																		
297	Lurah Durian	Kecamatan Bajenis	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
298	Sekretaris Kelurahan Durian	Kecamatan Bajenis	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
299	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
300	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
301	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Pelita																		
302	Lurah Pelita	Kecamatan Bajenis	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
303	Sekretaris Kelurahan Pelita	Kecamatan Bajenis	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
304	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
305	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
306	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bajenis	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
KECAMATAN PADANG HILIR																		
307	Camat Padang Hilir	Kecamatan Padang Hilir	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575

308	Sekretaris Kecamatan Padang Hilir	Kecamatan Padang Hilir	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
309	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Padang Hilir	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
310	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Padang Hilir	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
311	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
312	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Padang Hilir	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
313	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
314	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
Kelurahan Tambangan																		
315	Lurah Tambangan	Kecamatan Padang Hilir	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
316	Sekretaris Kelurahan Tambangan	Kecamatan Padang Hilir	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
317	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
318	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
319	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Tebing Tinggi																		
320	Lurah Tebing Tinggi	Kecamatan Padang Hilir	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
321	Sekretaris Kelurahan Tebing Tinggi	Kecamatan Padang Hilir	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
322	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
323	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
324	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Bagelen																		
325	Lurah Bagelen	Kecamatan Padang Hilir	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
326	Sekretaris Kelurahan Bagelen	Kecamatan Padang Hilir	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
327	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
328	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
329	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

Kelurahan Damar Sari																		
330	Lurah Damar Sari	Kecamatan Padang Hilir	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
331	Sekretaris Kelurahan Damar Sari	Kecamatan Padang Hilir	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
332	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
333	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
334	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Deblod Sundoro																		
335	Lurah Deblod Sundoro	Kecamatan Padang Hilir	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
336	Sekretaris Kelurahan Deblod Sundoro	Kecamatan Padang Hilir	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
337	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
338	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
339	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Satria																		
340	Lurah Satria	Kecamatan Padang Hilir	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
341	Sekretaris Kelurahan Satria	Kecamatan Padang Hilir	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
342	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
343	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
344	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Tambangan Hulu																		
345	Lurah Tambangan Hulu	Kecamatan Padang Hilir	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
346	Sekretaris Kelurahan Tambangan Hulu	Kecamatan Padang Hilir	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
347	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
348	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
349	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hilir	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
KECAMATAN PADANG HULU																		
350	Camat Padang Hulu	Kecamatan Padang Hulu	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
351	Sekretaris Kecamatan Padang Hulu	Kecamatan Padang Hulu	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575

352	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Padang Hulu	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
353	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Padang Hulu	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
354	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
355	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Padang Hulu	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
356	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hulu	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
357	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hulu	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
Kelurahan Lubuk Baru																		
358	Lurah Lubuk Baru	Kecamatan Padang Hulu	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
359	Sekretaris Kelurahan Lubuk Baru	Kecamatan Padang Hulu	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
360	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
361	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
362	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Pabatu																		
363	Lurah Pabatu	Kecamatan Padang Hulu	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
364	Sekretaris Kelurahan Pabatu	Kecamatan Padang Hulu	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
365	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
366	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
367	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Lubuk Raya																		
368	Lurah Lubuk Raya	Kecamatan Padang Hulu	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
369	Sekretaris Kelurahan Lubuk Raya	Kecamatan Padang Hulu	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
370	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
371	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
372	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Padang Merbau																		
373	Lurah Padang Merbau	Kecamatan Padang Hulu	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310

374	Sekretaris Kelurahan Padang Merbau	Kecamatan Padang Hulu	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
375	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
376	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
377	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Persiakan																		
378	Lurah Persiakan	Kecamatan Padang Hulu	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
379	Sekretaris Kelurahan Persiakan	Kecamatan Padang Hulu	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
380	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
381	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
382	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Tualang																		
383	Lurah Tualang	Kecamatan Padang Hulu	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
384	Sekretaris Kelurahan Tualang	Kecamatan Padang Hulu	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
385	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
386	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
387	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Bandarsono																		
388	Lurah Bandar Sono	Kecamatan Padang Hulu	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
389	Sekretaris Kelurahan Bandar Sono	Kecamatan Padang Hulu	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
390	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
391	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
392	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padang Hulu	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
KECAMATAN RAMBUTAN																		
393	Camat Rambutan	Kecamatan Rambutan	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
394	Sekretaris Kecamatan Rambutan	Kecamatan Rambutan	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
395	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Rambutan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

396	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Rambutan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
397	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
398	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Rambutan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
399	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
400	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
Kelurahan Karya Jaya																		
401	Lurah Karya Jaya	Kecamatan Rambutan	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
402	Sekretaris Kelurahan Karya Jaya	Kecamatan Rambutan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
403	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
404	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
405	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Lalang																		
406	Lurah Lalang	Kecamatan Rambutan	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
407	Sekretaris Kelurahan Lalang	Kecamatan Rambutan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
408	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
409	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
410	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Rantau Laban																		
411	Lurah Rantau Laban	Kecamatan Rambutan	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
412	Sekretaris Kelurahan Rantau Laban	Kecamatan Rambutan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
413	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
414	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
415	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Mekar Sentosa																		
416	Lurah Mekar Sentosa	Kecamatan Rambutan	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
417	Sekretaris Kelurahan Mekar Sentosa	Kecamatan Rambutan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310

418	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
419	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
420	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Sri Padang																		
421	Lurah Sri Padang	Kecamatan Rambutan	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
422	Sekretaris Kelurahan Sri Padang	Kecamatan Rambutan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
423	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
424	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
425	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Tanjung Marulak																		
426	Lurah Tanjung Marulak	Kecamatan Rambutan	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
427	Sekretaris Kelurahan Tanjung Marulak	Kecamatan Rambutan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
428	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
429	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
430	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Tanjung Marulak Hilir																		
431	Lurah Tanjung Marulak Hilir	Kecamatan Rambutan	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
432	Sekretaris Kelurahan Tanjung Marulak Hilir	Kecamatan Rambutan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
433	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
434	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
435	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambutan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA																		
436	Camat Tebing Tinggi Kota	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
437	Sekretaris Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
438	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

439	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
440	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
441	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
442	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
443	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
Kelurahan Bandar Utama																			
444	Lurah Bandar Utama	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
445	Sekretaris Kelurahan Bandar Utama	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
446	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
447	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
448	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Badak Bejuang																			
449	Lurah Badak Bejuang	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
450	Sekretaris Kelurahan Badak Bejuang	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
451	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
452	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
453	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Mandailing																			
454	Lurah Mandailing	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
455	Sekretaris Kelurahan Mandailing	Kecamatan Kota	Tebing Tinggi	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310

456	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
457	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
458	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Pasar Baru																		
459	Lurah Pasar Baru	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
460	Sekretaris Kelurahan Pasar Baru	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
461	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
462	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
463	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Pasar Gambir																		
464	Lurah Pasar Gambir	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
465	Sekretaris Kelurahan Pasar Gambir	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
466	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
467	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
468	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
Kelurahan Tebing Tinggi Lama																		
469	Lurah Tebing Tinggi Lama	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
470	Sekretaris Kelurahan Tebing Tinggi Lama	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
471	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
472	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

473	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
Kelurahan Rambung																			
474	Lurah Rambung	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310	
475	Sekretaris Kelurahan Rambung	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
476	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
477	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	
478	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

IMAN IRDIAN SARAGIH

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan		Faktor 2 Pengawasan		Faktor 3 Pedoman		Faktor 4 Kompleksitas		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh		Faktor 6 Hub. Pribadi		Faktor 7 Tujuan Hubungan		Faktor 8 Tuntutan Fisik)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	2	3	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
3	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Dokumentalis Hukum	D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Illmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
11	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Operator Laboratorium	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Pengelola Layanan Kesehatan	DIII (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Sarjana (S1) / Diploma IV bidang Kesehatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
17	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Teknisi Laboratorium	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

22	Pengelola Trantibum	D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Pranata Trantibum	SLTA sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Penata Kelola PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Konselor SDM	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi/Manajemen SDM/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
26	Penata Kelola dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
27	Penata Kelola dan Perikanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Manajemen Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
28	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	DIII (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan/Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komunikasi/Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
29	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknik Perikanan Laut, SUPM Teknik Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

		Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM																				
30	Pengawas Transportasi Darat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat / Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan / Teknik Keselamatan Otomotif/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
31	Petugas Transportasi Darat	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLA/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
32	Pengelola Siaran	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/ Penyiaran/ Broadcasting/Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
33	Fasilitator Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen / Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
34	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat	1	190	5	50	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

IMAN IRDIAN SARAGIH

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan	Faktor 2 Pengawasan	Faktor 3 Pedoman	Faktor 4 Kompleksitas	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh	Faktor 6 Hub. Pribadi	Faktor 7 Tujuan Hubungan	Faktor 8 Tuntutan Fisik)	Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	SEKRETARIAT DAERAH																				
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
4	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
5	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
6	Analisis Hukum Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
7	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
8	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1480	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	1870	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
10	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
11	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20

12	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
10	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Pertama	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
11	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Muda	10	1695	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
12	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Madya	12	2220	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	4	110	2	50	1	5	1	5
	SEKRETARIAT DPRD																				
13	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
15	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
16	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
17	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
18	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
19	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
20	Analisis Hukum Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
21	Analisis Hukum Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
22	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
23	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1480	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
24	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	1870	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
	INSPEKTORAT																				
25	Auditor Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
26	Auditor Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
27	Auditor Ahli Madya	12	2250	5	750	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	2	50	1	5	1	5
28	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

29	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
30	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	12	2145	5	750	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																				
31	Penilik Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
32	Penilik Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
33	Penilik Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
34	Guru Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
35	Guru Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
36	Guru Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
37	Pamong Budaya Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
38	Pamong Budaya Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
39	Pamong Budaya Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
40	Pengawas Sekolah Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
41	Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
42	Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
43	Pengembang Kurikulum Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
44	Pengembang Kurikulum Ahli Muda	9	1555	5	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
45	Pengembang Kurikulum Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
	DINAS KESEHATAN																				
46	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

47	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
48	Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
49	Dokter Ahli Pertama	9	1570	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
50	Dokter Ahli Muda	10	1720	6	950	2	275	3	275	3	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
51	Dokter Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	225	2	25	1	20	1	5	1	5
52	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
53	Dokter Gigi Ahli Muda	10	1670	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
54	Dokter Gigi Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
55	Perawat Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
56	Perawat Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
57	Perawat Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
58	Perawat Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
59	Perawat Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
60	Perawat Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
61	Bidan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
62	Bidan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
63	Bidan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
64	Bidan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
65	Bidan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
66	Bidan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
67	Apoteker Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
68	Apoteker Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
69	Apoteker Ahli Madya	11	1945	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
70	Asisten Apoteker Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
71	Asisten Apoteker Mahir	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
72	Asisten Apoteker Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
73	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
74	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
75	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20

76	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
77	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
78	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
79	Pranata Laboratorium Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
80	Pranata Laboratorium Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
81	Pranata Laboratorium Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
82	Pranata Laboratorium Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
83	Pranata Laboratorium Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
84	Pranata Laboratorium Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
85	Nutrisisionis Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
86	Nutrisisionis Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
87	Nutrisisionis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
88	Nutrisisionis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
89	Nutrisisionis Ahli Muda	9	1555	5	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
90	Nutrisisionis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
91	Sanitarian Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
92	Sanitarian Mahir	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
93	Sanitarian Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
94	Sanitarian Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
95	Sanitarian Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
96	Sanitarian Ahli Madya	11	1945	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
97	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
98	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
99	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20

100	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
101	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
102	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
103	Perekam Medis Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
104	Perekam Medis Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
105	Perekam Medis Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
106	Perekam Medis Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
107	Perekam Medis Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
108	Perekam Medis Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
109	Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
110	Epidemiolog Kesehatan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
111	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
112	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
113	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1555	5	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
114	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
115	Fisioterapis Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
116	Fisioterapis Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
117	Fisioterapis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
118	Fisioterapis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
119	Fisioterapis Ahli Muda	9	1555	5	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
120	Fisioterapis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
121	Refraksionis Optisien Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
122	Refraksionis Optisien Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
123	Refraksionis Optisien Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20

124	Radiografer Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
125	Radiografer Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
126	Radiografer Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
127	Teknisi Elektromedis Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
128	Teknisi Elektromedis Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
129	Teknisi Elektromedis Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
130	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
131	Psikolog Klinis Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
132	Psikolog Klinis Ahli Madya	11	1960	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
133	Penata Ruang Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
134	Penata Ruang Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
135	Penata Ruang Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
136	Teknik Pengairan (Penata Laksana Sumber Daya Air) Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
137	Teknik Pengairan (Penata Laksana Sumber Daya Air) Mahir	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
138	Teknik Pengairan (Penata Laksana Sumber Daya Air) Penyelia	9	1490	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
139	Teknik Pengairan (Pengelola Sumber Daya Air) Ahli Pertama	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
140	Teknik Pengairan (Pengelola Sumber Daya Air) Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
141	Teknik Pengairan (Pengelola Sumber Daya Air) Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5

142	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Laksana Jalan dan Jembatan) Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
143	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Laksana Jalan dan Jembatan) Mahir	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
144	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Laksana Jalan dan Jembatan) Penyelia	9	1490	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
145	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Kelola Jalan dan Jembatan) Ahli Pertama	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
146	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Kelola Jalan dan Jembatan) Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
147	Teknik Jalan dan Jembatan (Penata Kelola Jalan dan Jembatan) Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
148	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
149	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Mahir	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
150	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Penyelia	9	1490	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20

151	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Ahli Pertama	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
152	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
153	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																				
154	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
155	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
156	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
157	Penata Ruang Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
158	Penata Ruang Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
159	Penata Ruang Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
160	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
161	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
162	Pembina Jasa Konstruksi Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
163	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20

164	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Mahir	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
165	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Penyelia	9	1490	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
166	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Ahli Pertama	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
167	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
168	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman) Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
169	Teknik Penyehatan Lingkungan (Penata Laksana Penyehatan Lingkungan) Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
170	Teknik Penyehatan Lingkungan (Penata Laksana Penyehatan Lingkungan) Mahir	7	1050	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
171	Teknik Penyehatan Lingkungan (Penata Laksana Penyehatan Lingkungan) Penyelia	9	1490	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20

172	Teknik Kesehatan Lingkungan (Penata Kelola Kesehatan Lingkungan) Ahli Pertama	8	1325	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
173	Teknik Kesehatan Lingkungan (Penata Kelola Kesehatan Lingkungan) Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
174	Teknik Kesehatan Lingkungan (Penata Kelola Kesehatan Lingkungan) Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																				
175	Polisi Pamong Praja Pemula	5	505	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	2	20
176	Polisi Pamong Praja Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
	Polisi Pamong Praja Mahir	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
177	Polisi Pamong Praja Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
178	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
179	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
180	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
	DINAS SOSIAL																				
181	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
182	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
183	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
184	Pekerja Sosial Pemula	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	2	20
185	Pekerja Sosial Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
186	Pekerja Sosial Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
187	Pekerja Sosial Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
188	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
189	Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1555	5	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5

190	Pekerja Sosial Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
191	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
192	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
193	Penyuluh Sosial Ahli Madya	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
194	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	5	555	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	2	20
195	Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil	6	805	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
196	Penggerak Swadaya Masyarakat Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
197	Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
198	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
199	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
200	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	12	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN																				
201	Pembina Industri Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
202	Pembina Industri Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
203	Pembina Industri Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
204	Instruktur Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
205	Instruktur Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
206	Instruktur Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
207	Instruktur Ahli Pertama	8	1265	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
208	Instruktur Ahli Muda	10	1670	5	750	2	125	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
209	Instruktur Ahli Madya	12	2200	6	950	3	275	3	275	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
210	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

211	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	9	1555	5	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
212	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
213	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
214	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10	1720	6	950	2	275	3	275	3	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
215	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
216	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
217	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
218	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
219	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
220	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
221	Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Ahli Madya	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
222	Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
223	Pengantar Kerja Ahli Muda	10	1750	5	750	3	275	3	275	3	150	3	250	2	60	2	50	2	20	2	20
224	Pengantar Kerja Ahli Madya	12	2200	6	950	3	275	3	275	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																				
225	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	5	555	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	2	20
226	Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil	6	805	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
227	Penggerak Swadaya Masyarakat Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
228	Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

229	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
230	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
231	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	12	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
232	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
233	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
234	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
235	Pekerja Sosial Pemula	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	2	20
236	Pekerja Sosial Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
237	Pekerja Sosial Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
238	Pekerja Sosial Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
239	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
240	Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1555	5	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
241	Pekerja Sosial Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
242	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
243	Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
244	Penyuluh Sosial Ahli Madya	11	2030	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																				
245	Penata Kependudukan dan KB Ahli Pertama	8	1205	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
246	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
247	Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya	11	1865	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																				
248	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
249	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

250	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
251	Medik Veteriner Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
252	Medik Veteriner Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
253	Medik Veteriner Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
254	Pengawas Benih Tanaman Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
255	Pengawas Benih Tanaman Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
256	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
257	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
258	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
259	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
259	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
260	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
261	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
262	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
263	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
264	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
265	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
266	Pengawas Perikanan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
267	Pengawas Perikanan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
268	Pengawas Perikanan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

269	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
270	Pengawas Perikanan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
271	Pengawas Perikanan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
272	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
273	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
274	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
275	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
276	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
277	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
278	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
279	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
280	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
281	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	8	1215	5	750	2	125	2	125	2	75	1	25	2	25	2	50	2	20	2	20
282	Analisis Akuakultur Ahli Muda	9	1490	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
283	Analisis Akuakultur Ahli Madya	11	2040	5	750	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
284	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil	6	670	3	350	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
285	Analisis Pasar Hasil Pertanian Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
286	Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
287	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
288	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5

289	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	12	2170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
290	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
291	Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir	7	1080	4	550	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
292	Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
293	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
294	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
295	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	11	2060	6	950	4	450	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
296	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	8	1220	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
297	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
298	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
299	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	8	1265	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
300	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	10	1750	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	2	50	2	20	2	20
301	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya	12	2270	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	2	20	2	20
302	Pengawas Bibit Ternak Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
303	Pengawas Bibit Ternak Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
304	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
305	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
306	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5

307	Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
308	Penyuluh Pertanian Terampil	6	770	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	2	20	2	20
309	Penyuluh Pertanian Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
310	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1260	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
311	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
312	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
313	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
314	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	6	700	3	350	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	3	50	2	20
315	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir	7	1065	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	3	50	2	20
316	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	3	50	3	50
317	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
318	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
319	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																				
320	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
321	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
322	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

323	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
324	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
325	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
326	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
327	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
328	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
	DINAS PERHUBUNGAN																				
329	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
330	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
331	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
332	Sandiman Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
333	Sandiman Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
334	Sandiman Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
335	Sandiman Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
336	Sandiman Ahli Muda	10	1795	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5
337	Sandiman Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
338	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
339	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
340	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
341	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
342	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5

343	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
344	Pranata Komputer Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
345	Pranata Komputer Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
346	Pranata Komputer Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
347	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
348	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
349	Pranata Komputer Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
350	Statistisi Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
351	Statistisi Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
352	Statistisi Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
353	Statistisi Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
354	Statistisi Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
355	Statistisi Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
356	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	8	1235	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
357	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9	1460	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
358	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11	1995	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
359	Pranata Komputer Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
360	Pranata Komputer Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
361	Pranata Komputer Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
362	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
363	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
364	Pranata Komputer Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5

365	Penata Kependudukan dan KB Ahli Pertama	8	1205	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
366	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	2	20	2	20
367	Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya	11	1865	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																				
368	Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
369	Pengantar Kerja Ahli Muda	10	1750	5	750	3	275	3	275	3	150	3	250	2	60	2	50	2	20	2	20
370	Pengantar Kerja Ahli Madya	12	2200	6	950	3	275	3	275	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
371	Penata Perizinan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
372	Penata Perizinan Ahli Muda	10	1750	5	750	3	275	3	275	3	150	3	250	2	60	2	50	2	20	2	20
373	Penata Perizinan Ahli Madya	12	2200	6	950	3	275	3	275	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
374	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
375	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
376	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	2310	6	950	4	450	4	450	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
377	Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
378	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	10	1705	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
379	Penjamin Mutu Produk Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
380	Penguji Mutu Barang Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
381	Penguji Mutu Barang Mahir	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
382	Penguji Mutu Barang Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
383	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20

384	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
385	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
386	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
387	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
388	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA																				
389	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
390	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
391	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
392	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
393	Pelatih Olahraga Ahli Muda	9	1505	5	750	2	125	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
394	Pelatih Olahraga Ahli Madya	11	1965	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	3	60	1	20	1	5	1	5
395	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
396	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	10	1790	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
397	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	12	2240	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																				
398	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
399	Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	1705	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
400	Analisis Perdagangan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
401	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

402	Pengawas Koperasi Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
403	Pengawas Koperasi Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
404	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
405	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	10	1685	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
406	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	12	2310	6	950	4	450	4	450	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
407	Penera Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
408	Penera Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
409	Penera Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
410	Penera Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
411	Penera Ahli Muda	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
412	Penera Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
413	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
414	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	10	1685	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
415	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	12	2310	6	950	4	450	4	450	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																				
416	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
417	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
418	Arsiparis Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
419	Arsiparis Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
420	Arsiparis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
421	Arsiparis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
422	Arsiparis Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
423	Arsiparis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
424	Pustakawan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
425	Pustakawan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

426	Pustakawan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
427	Pustakawan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
428	Pustakawan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
429	Pustakawan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																				
430	Pemadam Kebakaran Pemula	5	630	3	350	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	3	50	3	50
431	Pemadam Kebakaran Terampil	6	695	3	350	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	1	20	3	50	3	50
432	Pemadam Kebakaran Mahir	7	1000	3	350	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	3	50	3	50
433	Pemadam Kebakaran Penyelia	8	1275	3	550	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50
434	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	2	75	3	150	1	10	1	20	2	20	2	20
435	Analisis Kebakaran Ahli Muda	9	1415	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	2	20
436	Analisis Kebakaran Ahli Madya	11	1990	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	2	20	2	20
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																				
437	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
438	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
439	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
440	Arsiparis Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
441	Arsiparis Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
442	Arsiparis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
443	Arsiparis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
444	Arsiparis Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
445	Arsiparis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
446	Peneliti Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
447	Peneliti Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
448	Peneliti Ahli Madya	12	2330	7	1250	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	3	120	1	5	1	5

	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH																				
449	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
450	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1480	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
451	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	1870	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
452	Penata Laksana Barang Terampil	7	1070	4	550	2	125	1	25	3	150	2	75	2	25	1	20	3	50	3	50
453	Penata Laksana Barang Mahir	8	1275	4	550	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50
454	Penata Laksana Barang Penyelia	9	1550	5	750	2	125	2	125	4	225	3	150	2	25	2	50	3	50	3	50
455	Analisis Keuangan Negara Terampil	7	910	3	350	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
456	Analisis Keuangan Negara Mahir	8	1240	3	350	3	275	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
457	Analisis Keuangan Negara Penyelia	9	1570	3	350	3	275	3	275	4	225	4	225	3	60	3	120	1	5	1	5
458	Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	8	1290	4	550	2	125	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
459	Analisis Keuangan Negara Ahli Muda	10	1820	4	550	3	275	3	275	4	225	4	225	4	110	3	120	1	5	1	5
460	Analisis Keuangan Negara Ahli Madya	12	2295	5	750	4	450	3	275	5	325	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5
461	Pengawas Keuangan Negara Terampil	7	925	3	350	2	125	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
462	Pengawas Keuangan Negara Mahir	8	1255	3	350	3	275	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5
463	Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9	1405	3	350	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5
464	Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	8	1305	4	550	2	125	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5
465	Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	10	1835	4	550	3	275	3	275	4	225	4	225	4	110	3	120	2	20	1	5
466	Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya	12	2310	5	750	4	450	3	275	5	325	4	255	4	110	3	120	2	20	1	5
467	Penilai Pajak Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

468	Penilai Pajak Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
469	Penilai Pajak Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
470	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
471	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
472	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
473	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
474	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
475	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
476	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
477	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10	1770	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
478	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12	2240	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																				
479	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
480	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1480	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
481	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	1870	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
482	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
483	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

484	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																				
485	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
486	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
487	Perencana Ahli Madya	12	2175	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
488	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8	1220	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
489	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	9	1435	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	2	20
490	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	12	2155	6	950	3	275	3	275	4	225	4	225	3	60	3	120	1	5	2	20

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

IMAN IRDIAN SARAGIH

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

